

HISTORY THE MOVEMENT OF MASJUMI IN INDONESIA AT 1943-1960

Utari Mariaty*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum, Drs. Marwoto Saiman, M.Pd *****
Email: umariaty@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com, marwoto.sejarah@yahoo.com
Cp: 085271393344

**Social Science Departement
History Education FKIP-University Of Riau
Bina Widya Street, Km. 12,5 Pekanbaru**

***Abstract:** In the history of the process of political development in Indonesia, some of the political parties involved in the process of identity affirmation of Islam in Indonesian politics. One of the political party whose role is Masjumi. Masjumi trip since it was established on 7 November 1945 and disbanded in 1960 full of dynamics, both within the internal Masjumi or when dealing with the government and President Soekarno. This research have a purpose to know about (1) the early history of the founding of the Masjumi (2) political conditions in Indonesia before standing Masjumi (3) Masjumi role in government (4) because the dissolution Masjumi. This research use a qualitative method with approach history and techniques of data collection in the form of literature and documentation. The results of this research indicate that during its existence in Indonesia, Masjumi is a party that was involved in the administration. Masjumi relationship with President Sukarno had experienced a harmonious relationship, especially during the revolution. That relationship has shifted lead to conflicts, especially since the desire of the President to bury the political parties. Masjumi party leader's decision to break up, to be accepted by members of the Masjumi with no resistance to the leadership Masjumi.*

***Keywords:** Masjumi Party, The Presidential Decree of August 17, 1960*

SEJARAH PERGERAKAN PARTAI MASYUMI DI INDONESIA TAHUN 1943-1960

Utari Mariaty*, Drs. Ridwan Melay, M.Hum **, Drs. Marwoto Saiman, M.Pd***
Email: umariaty@yahoo.com, ridwanmelay@yahoo.com , marwoto.sejarah@yahoo.com
Cp: 085271393344

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
PendidikanSejarah FKIP-Universitas Riau
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru**

Abstrak: Dalam sejarah proses pembangunan politik di Indonesia, beberapa partai politik berperan dalam proses pengukuhan identitas Islam di panggung politik Indonesia. salah satu partai politik yang berperan adalah partai Masyumi. Perjalanan partai Masyumi sejak didirikan pada tanggal 7 November 1945 sampai dibubarkan pada tahun 1960 penuh dengan dinamika, baik di dalam internal Masyumi maupun ketika berhubungan dengan pemerintahan dan Presiden Soekarno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejarah awal berdirinya partai Masyumi (2) kondisi politik di Indonesia sebelum berdiri partai Masyumi (3) peran partai Masyumi dalam pemerintahan (4) sebab pembubaran partai Masyumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah dan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama keberadaannya di Indonesia, Masyumi merupakan partai yang ikut terlibat dalam pemerintahan. Hubungan partai Masyumi dengan Presiden Soekarno pernah mengalami hubungan yang harmonis, terutama pada masa revolusi. Hubungan itu mengalami pergeseran hingga menjurus kepada konflik, terutama sejak adanya keinginan Presiden Soekarno untuk mengubur partai politik. Keputusan pemimpin partai Masyumi yang membubarkan diri, bisa diterima oleh anggota partai Masyumi dengan tidak melakukan perlawanan terhadap pimpinan Masyumi.

Kata kunci : *Partai Masyumi, Keputusan Presiden 17 Agustus 1960*

PENDAHULUAN

Bangsa tidak pernah terlepas dari persamaan keturunan ras atau persamaan agama, akan tetapi mereka mempunyai persamaan hidup dalam satu wilayah tertentu, seperti halnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, daerah, agama dan adat istiadat. Namun bertekad satu seperti tercermin dalam satu kesatuan yang kokoh dan kuat di dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah memberikan kesempatan kepada berbagai aliran politik di Indonesia untuk bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi. Zaman penjajahan Jepang di Indonesia, dalam keterkaitannya dengan posisi politik umat Islam memunculkan fenomena yang berbeda dengan fenomena zaman Belanda. Jika penjajahan Belanda lebih menampakkan sikap anti-Islam, Jepang justru memperlihatkan sikap bersahabat terhadap umat Islam. Mereka mengakui bahwa pentingnya kedudukan umat Islam di dalam dunia kepolitikan di Indonesia.

Sikap bersahabat penjajah Jepang terhadap umat Islam, pertama kali diperlihatkan ketika mereka membentuk Gerakan Tiga A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Cahaya Asia) pada bulan April 1942. Akan tetapi tentara pendudukan Jepang menilai bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif untuk memobilisasi rakyat, karena itu mereka membubarkan gerakan tersebut. Sebagai gantinya pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk organisasi politik baru yang disebut Poesat Tenaga Rakyat (Poetra). Akan tetapi, organisasi baru ini hanya mendapat sedikit dukungan, sebagian dikarenakan pihak Jepang tetap tidak bersedia memberi kebebasan kepada kekuatan-kekuatan rakyat yang potensial. Pihak Jepang mulai membawa kelompok para kyai yang tergabung dalam Madjlisul Islamil A'laa Indonesia (MIAI) untuk menyentuh perasaan yang responsif di kalangan masyarakat.

Perkembangan kalangan Islam dapat dilihat dari didirikan kembali MIAI di Jakarta tanggal 5 September 1942. Anggota-anggota MIAI di Jawa pun terbatas pada organisasi-organisasi Islam yang diakui saja. Federasi ini diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada akhir tahun 1943. Satu bulan, *Soeara MIAI* diterbitkan yang kemudian dilanjutkan dengan *Soeara Moeslimin Indonesia* dengan berdirinya Masyumi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) sejarah awal berdirinya partai Masyumi (2) kondisi politik di Indonesia sebelum berdiri partai Masyumi (3) peran partai Masyumi dalam pemerintahan (4) sebab pembubaran partai Masyumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian data tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa tersebut. Kemudian penelitian menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat diperpustakaan daerah Soeman HS, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Sejarah, dan tempat-tempat lain

yang menurut penulis dapat memberikan informasi tentang partai Masyumi dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia

1. Awal Berdirinya Partai Masyumi

Kesadaran pemimpin-pemimpin organisasi Islam untuk menyatukan diri dalam satu federasi diwujudkan pada tanggal 21 September 1937 dengan berdirinya Madjlisul Islamil A'laa Indonesia (MIAI) yang didirikan atas inisiatif K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, K.H.M. Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah dari Nahdatul Ulama, Wondoamisseno dari Sarekat Islam dan tokoh organisasi Islam lainnya seperti Persatuan Ulama dan Al-Irsyad. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendirian MIAI adalah inisiatif dari para pemimpin organisasi-organisasi Islam Indonesia untuk menyatukan diri dalam satu organisasi Islam tanpa ada campur tangan dari pihak penjajah.

Pada awalnya Masyumi didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan suatu badan untuk mengumpulkan dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Bulan-bulan terakhir tahun 1943 membuka suatu era perubahan mendalam oleh Jepang terhadap kehidupan politik Indonesia. Diciptakannya organisasi baru tersebut (Masyumi) yang diberi status hukum langsung pada hari didirikannya, tak ayal lagi merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Dari apa yang diungkapkan di atas pembubaran MIAI yang kemudian digantikan dengan Masyumi adalah salah satu politik Jepang untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia.

2. Asas Partai Masyumi

Partai Masyumi adalah partai berasaskan Islam yang bertujuan agar terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Republik Indonesia untuk menuju keridhaan ilahi. Asas tersebut mengemukakan agar semua hukum dan peraturan negara sesuai dengan hukum dan peraturan Islam. Hal ini tidak akan merugikan dan tidak ada prinsip Islam yang berlawanan dengan ajaran agama lain. Menurut Masyumi, asas Islam merupakan cita-cita yang bisa tumbuh dalam ketertiban dan keamanan, kekacauan akan memboroskan tenaga, harta dan jiwa. Kekacauan akan meruntuhkan segala usaha dan ikhtiar. Oleh karena itu partai menolak setiap usaha dari pihak manapun yang mengakibatkan kekacauan dan kelumpuhan negara serta alat-alatnya.

3. Keanggotaan Partai Masyumi

Keanggotaan partai Masyumi dibagi menjadi dua macam:

- a. Perorangan : untuk menjadi anggota perorangan harus berumur 18 tahun atau sudah berkeluarga, tidak boleh merangkap menjadi anggota partai lain dan setiap anggota mempunyai hak suara.
- b. Organisasi (anggota istimewa) : anggota ini berdasarkan organisasi-organisasi dan mempunyai hak nasehat atau saran.

4. Susunan Organisasi Partai Masyumi

Keputusan membentuk Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam tidak sekedar sebagai keputusan tokoh Islam tersebut, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan wakil-wakil mereka. Penilaian ini cukup beralasan apabila Masyumi dilihat dari susunan kepengurusannya, yang mencerminkan wakil-wakil sejumlah partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam.

- a. **Majelis Syura (Dewan Partai)**, terdiri dari K.H. Hasyim Asy'ari (NU) sebagai Ketua Umum, Ki Bagus Hadikusuma (Muhammadiyah) sebagai Ketua Muda I, K.H. Wahid Hasyim (NU) sebagai Ketua Muda II dan Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) sebagai Ketua Muda III. **Anggota** : R.H.M. Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawai), H. Agus Salim (Penjadar), K.H. Abdul Wahab (NU), K.H. Sanusi (PUI) dan Syekh Djamil Djambek (Majlis Tinggi, MIT).
- b. **Pengurus Besar**, terdiri dari Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Partai Islam Indonesia) sebagai Ketua Umum, Abikusno Tjokrosujoso sebagai Ketua Muda I, Wali Alfatah sebagai Ketua Muda II, Harsono Tjokroaminoto sebagai Sekretaris I, Prawoto Mangkusaswito sebagai Sekretaris II dan Mr. R.A. Kasmat sebagai Bendahara.

B. Kondisi Politik di Indonesia Sebelum Berdirinya Partai Masyumi

Sepanjang sejarah Indonesia, umat Islam mengalami pasang surut dalam perjuangan politiknya. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, politik Islam cenderung menyatu dengan agama. Dalam hal ini, para ulama memainkan peran penting di dalam kerajaan dan menjadi alat pertimbangan kekuasaan sultan. Sistem politik Adu Domba (Devide et Impera) yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia satu demi satu dapat dikuasai oleh Belanda.

Ketika perbatasan Hindia Belanda mulai mengambil bentuk menjadi Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato

tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan. Politik Etis memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kaum elit Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kebebasan dan demokrasi. Kesadaran nasional yang diperlihatkan oleh bangsa Indonesia dimulai dari berdirinya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indische Partij dan masih banyak lagi pergerakan nasional yang lainnya.

C. Partai Masyumi Dalam Pemerintahan

Agama Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas penduduknya, namun agama Islam dalam masa permulaan revolusi tidak kuat didalam pemerintahan, ketidakkuatan ini dapat dilihat pada kabinet, karena hanya dua menteri yang mewakili dari Islam yaitu : Wahid Hasyim dan Abikusno Tjokrosujoso. Kemudian dalam Badan Pekerja KNIP yang jumlahnya 15 orang dan dibentuk Oktober 1945 hanya ada dua orang lagi dari wakil umat Islam yang duduk yaitu Wahid Hasyim dan Sjafruddin Prawiranegara.

Ketika badan pekerja ini diperluas menjadi 26 pada bulan Desember dengan memasukan wakil-wakil daerah, namun pada saat itu hanya ada empat orang yang mewakili umat Islam kala itu. Sungguhpun demikian Masyumi yang merupakan satu-satunya partai Islam ketika itu, dan merasa pembagian sedemikian itu kurang adil dari pemerintah kepada partai ini. Sesungguhnya partai Masyumi mengharapkan adanya porsi besar didalam tubuh pemerintahan Indonesia. Partai Masyumi juga menekankan perlunya persatuan serta pertahanan kemerdekaan daripada mempersoalkan kepentingan diri. Partai Masyumi tidak menyetujui perubahan sistem kabinet presidensil ke kabinet parlementer.

Perkembangan-perkembangan politik berkembang dengan cepat, yang memerlukan adanya segera satu KNIP yang dianggap lebih sempurna dari yang sudah-sudah, maka dengan menggunakan hak prerogratif. Presiden mengeluarkan hak prerogratif, presiden mengeluarkan dekrit No.6/1946 dimana diatur penambahan anggota KNIP. Menurut dekrit tersebut, jumlah anggota-anggota yang ditambah dengan perwakilan dari partai-partai, golongan-golongan dan daerah-daerah sebagai berikut : Masyumi 60 kursi, PNI 45 kursi, Partai Sosialis 35 kursi, PBI 35 kursi, Golongan Buruh 40 kursi, Golongan Tani 40 kursi, Parkindo 8 kursi, PKRI 4 kursi, selain itu perwakilan dari daerah ditambah pula. Demikian seluruh anggota KNIP akan berjumlah lebih kurang 500 anggota.

D. Pembubaran Partai Masyumi

Setelah pemilu 1955, Masyumi semakin sering berbeda pendapat dengan partai-partai lain di kabinet maupun parlemen, terutama peranan PKI. Hal itu menimbulkan perselisihan dengan Presiden Soekarno, yang menginginkan dilibatkannya PKI dalam kehidupan pemerintahan. Tajamnya perselisihan dalam isu PKI akhirnya mendorong sejumlah petinggi Masyumi, seperti M. Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara ikut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta yang anti-

komunis. Keterlibatan sejumlah tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan penolakan Masyumi untuk memecat mereka dari keanggotaan partai tersebut akhirnya memberikan alasan bagi Soekarno untuk membubarkan Masyumi.

Tahun 1959 adalah saat genting dalam kepartaian Indonesia. Setelah kebebasan yang dipertontonkan empat tahun sebelumnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Pnps No 7 Tahun 1959 yang membatasi gerak partai. Tekanan terhadap partai semakin berat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Tahun 1960 yang menyatakan partai yang diakui pemerintah hanyalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), PSII, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, Perti, dan Murba. Sementara Masyumi dan PSI bernasib sama dengan puluhan partai lainnya, tidak diakui dan dibubarkan. Pembubaran Masyumi pada tahun 1960 merupakan pukulan telak bagi kekuatan politik Islam.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No.200 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1960, yang isinya Pemerintah membubarkan partai Islam Masyumi termasuk bagian-bagiannya, cabang-cabang dan ranting-rantingnya diseluruh Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa dalam waktu 30 hari pemimpin partai Masyumi diharuskan menyatakan partainya bubar dengan segera memberitahukan kepada Presiden Soekarno.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Islam merupakan agama yang mencakup semua segi kehidupan, Islam tidak menyetujui penyekatan antara agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik selaras dengan tuntunan yang diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan.
2. Dilihat dari sejarah kebangkitan partai Masyumi di Indonesia tidak bisa terlepas dari kemunculan ruang publik. Ruang publik dianggap penting karena merupakan lokasi tempat wacana-wacana yang diekspresikan dan merupakan ruang tempat kegiatan-kegiatan politik.
3. Dalam beberapa kesempatan, Masyumi diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet. Dari beberapa kabinet yang berjalan dalam pemerintahan, tiga kabinet dipercayakan kepemimpinannya kepada Masyumi yaitu, Kabinet Natsir pada 1950-1951, Kabinet Sukiman pada 1951-1952 dan Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956.
4. Sejak awal keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI/Permesta dijadikan alasan untuk memukul mundur agar Masyumi dibubarkan dalam perpolitikan.

B. Rekomendasi

Beberapa poin yang penulis uraikan, ada kiranya di penghujung bab ini akan penulis cantumkan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang mempunyai rasa memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Pada pembahasan sejarah pergerakan partai Masyumi disebutkan bahwa pilihan Islam sebagai ideologi partai adalah sejalan dengan Islam yang melarang kita untuk berlaku tidak adil. Keadilan adalah prinsip pokok yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafi'i Ma'arif. 2006. Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta. P.T.Pustaka.

Anwar Harjono, S.H. 1997. Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan. Jakarta. Gema Insani Press.

Deliar Noer. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta. PT.Pustaka Utama.

Benda, Harry J.. 1985. Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. a.b. Daniel Dhakidae. Jakarta. Pustaka Jaya Grafiti.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta. Kencana.

<http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/089>. Pergeseran Kekuatan Partai Nasionalis dan Islam. Pdf, judul tulisan, Pergeseran Kekuatan Partai Nasionalis dan Islam, 1955-2004.